

KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH

Elanda Sari

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Performance Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Tax Collection of ground water. The purpose of this study was to describe and analyze the performance UPTD District of Bengkalis in tax collection of underground water and the factors that influence it. This research method including qualitative research. The informants are UPTD Subdistrict Head Bengkalis, an employee of the District UPTD Bengkalis, tax payers and tax collectors officer. The technique of collecting data using interview techniques and documentation, while data analysis techniques using qualitative techniques with a descriptive approach. The survey results revealed that the District Bengkalis UPTD performance in tax collection of underground water in the Department of Revenue Bengkalis basically still low. While the factors that affect the performance of the District UPTD Bengkalis factor is still low awareness of the taxpayer in the form of an obligation to pay taxes as dependents. This makes the tax officers overwhelmed the field officers to collect and shortcomings in implementing tax collection.

Keywords: performance, underground water tax, UPTD

Abstrak: Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala UPTD Kecamatan Bengkalis, pegawai UPTD Kecamatan Bengkalis, masyarakat wajib pajak dan petugas pemungut pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya masih rendah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis adalah faktor kesadaran wajib pajak masih rendah dalam membayar pajak sebagai bentuk kewajiban yang ditanggungnya. Hal ini membuat petugas pajak kewalahan dalam menagihnya dan kekurangan petugas lapangan dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Kata kunci: kinerja, pajak air bawah tanah, UPTD

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat laju pembangunan pada segala bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menggali potensi yang dimiliki dan melalui salah satunya adalah sektor pajak daerah. Penerimaan dari sektor pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan

dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD (pajak hotel (Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Dana Perimbangan

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terkait potensi pajak air permukaan tanah jika ditarik dengan optimal maka akan mendatangkan pendapatan bagi daerah yang cukup signifikan, apalagi perusahaan memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan industrinya seperti air gallon dan rumah makan serta hotel. Pajak air tanah dan air permukaan termasuk bagian dari pendapatan daerah, hanya saja hingga setakat ini khusus untuk pajak air di Kabupaten Bengkalis, belum berpengaruh signifikan terhadap perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Saat ini pajak air belum berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bengkalis, karena tarifnya hanya Rp. 125/kubik untuk pihak wajib pajak pengelola air. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

Pengelolaan pajak air bawah tanah adalah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah yakni melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bengkalis seperti UPTD Kecamatan Bengkalis, UPTD Kecamatan Bantan, UPTD Kecamatan Bukit Batu, UPTD Kecamatan Mandau, UPTD Kecamatan Rupert Utara, UPTD Kecamatan Rupert dan UPTD Kecamatan Pinggir. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri. Realisasi pajak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya mengenai pajak air bawah tanah. Kinerja UPTD dalam rangka pengelolaan pajak air bawah tanah di Kabupaten Bengkalis belum optimal hal ini dapat dilihat pencapaian atau realisasi pajak air bawah tanah hanya 50%. Fakta empirik di atas yang meru-

pakan hasil laporan dari UPTD Kecamatan Bengkalis, menunjukkan adanya fenomena rendahnya kinerja UPTD khususnya di Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka bagaimanakah kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah?

Mangkunegara (2009), mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Agus Dwiyanto (2002) penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi. Dalam penilaian kinerja, terutama pada organisasi birokrasi publik ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: a). Produktivitas, konsep Produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan; b). Kualitas layanan, cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik; c). Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; d). Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas; e). Akuntabilitas, publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja UPTD Pajak Air Bawah Tanah Kecamatan Bengkalis.

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Key informan terdiri dari Kepala UPTD Dinas Pendapatan Kecamatan Bengkalis, pegawai UPTD, masyarakat wajib pajak dan pemungut pajak. Teknik analisis data menggunakan model interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Produktivitas

Berikut ini gambaran tentang produktivitas pemungutan pajak air tanah di Kecamatan Bengkalis:

Tabel 1. Produktivitas pemungutan pajak air tanah di Kecamatan Bengkalis, tahun 2012

No	Sumber	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Rumah Makan	4.869.256	1.191.165	45%
2	Hotel	3.246.170	2.596.936	80%
3	Door Smeer	1.082.057	363.571	34%
4	Lainnya	1.623.085	292.155	18%
		10.820.569	5.443.828	50%

Sumber: UPTD Kecamatan Bengkalis Tahun 2014

Dari tabel 1 terlihat bahwa target dan realisasi per sumber Pajak Air Tanah di Kecamatan Bengkalis dilihat dari beberapa jenis usaha seperti usaha rumah makan, hotel, door smeer dan lainnya. Yang menunjukkan realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan.

Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan UPTD pendapatan yang menunjukkan kinerja organisasi UPTD kepada wajib pajak sudah maksimal dalam memberikan pelayanan publik di dalam birokrasi pemerintahan, sehingga bisa disimpulkan kemampuan pegawai UPTD Pendapatan Kecamatan Bengkalis dalam memberikan pelayanan kepada setiap wajib pajaknya sudah baik terutama wajib pajak air tanah, yang merupakan suatu penilaian kinerja yang dicapai oleh pegawai UPTD Pendapatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Responsivitas

Berikut ini data tentang keluhan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan pada pajak air tanah seperti tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Keluhan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan pada pajak air tanah di UPTD Kecamatan Bengkalis

No	Keluhan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kualitas Air	15	42.9%
2	Meteran Air	7	20.0%
3	Petugas	4	11.4%
4	Sosialisasi	6	17.1%
5	Lainnya	3	8.6%
	Jumlah	35	100.0%

Sumber: UPTD Kecamatan Bengkalis Tahun 2014

Dari tabel 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan UPTD Pendapatan dalam mengayomi dan menerima aspirasi

masyarakat wajib pajak merupakan bukti keuletan dan soft skill yang dimiliki pegawai UPTD dalam membuat kebijakan dalam mengatasi fenomena-fenomena yang ada dilapangan sudah maksimal dilaksanakan. Hal ini juga menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan, terutama dalam memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib pajak tersebut.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik didalam birokrasi pemerintahan, hal itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi didalam ilmu administrasi yang diterapkan didalam birokrasi pemerintah yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan Bengkalis, baik yang eksplisit maupun implicit dalam pelaksanaan pembayaran pajak masih rendah, hal ini dikarenakan sistem pembayaran yang masih manual terkadang tidak seimbang dengan jumlah pemakaian mereka.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam melaksanakan pemungutan pajak oleh petugas dan UPTD di Kecamatan Bengkalis dalam rangka memungut pajak air bawah tanah masih terkesan belum memuaskan, hal ini dapat dilihat dari berbagai keluhan yang dirasakan oleh pemilik usaha yang menggunakan air bawah tanah seperti tidak jelasnya tariff dan berapa yang dikenakan kepada mereka sehingga mereka sebagian merasa keberatan dalam membayar pajak air bawah tanah. Selain itu juga masalah keadilan kepada seluruh pengusaha yang ada dinilai tidak merata dikenakan pajak air bawah tanah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai dan juga belum tersedianya meteran air sehingga pelaksanaan pengutan pajak air tanah masih dalam sistem manual, yakni dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang menggunakan air tanah untuk usaha mereka. Kemudian pelayanan yang diberikan pegawai UPTD kepada wajib pajak sudah baik, namun tanggapan masyarakat bukan terhadap kualitas layanan yang diberikan pegawai UPTD tetapi tanggapan masyarakat terhadap pembayaran pajak air tanah, karena mereka menggunakan air tanah sedikit tetap saja harus dibayar, walaupun hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan organisasi publik didalam birokrasi pemerintahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi didalam ilmu administrasi yang diterapkan didalam birokrasi pemerintah disesuaikan dengan kebijakan organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan Bengkalis baik yang eksplisit maupun implisit. Pelaksanaan pembayaran pajak masih rendah, dikarenakan system pembayaran yang masih manual, terkadang tidak seimbang dengan jumlah pemakaian mereka. Pertanggungjawaban pelanggan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah yang dikenakan kepada masyarakat, masih dirasakan kurang memuaskan. Berkenaan dengan kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam rangka pemungutan pajak air tanah terbukti masih belum optimal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor: a). Kesadaran masyarakat, juga mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut **Herry Susanto (2012)** kesadaran

dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemungut pajak mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak air tanah, penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor kesadaran wajib pajak air bawah tanah masih rendah dalam rangka membayar pajak sebagai bentuk kewajiban yang ditanggungnya. Hal ini membuat petugas pajak kewalahan dalam menagihnya; b). Keterbatasan SDM, sebagai penggerak pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak air tanah ini masih dinilai sangat kurang dari kebutuhan yang ada. Hanya terdapat 3 orang petugas untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak air tanah. Dari tiga orang tersebut tidak semua juga turun ke lapangan, sebagian dari mereka mangkal di kantor untuk menjaga kantor. Keterbatasan petugas pelaksana di lapangan inilah yang juga ikut menyebabkan pelaksanaan pemungutan pajak berupa kinerja UPTD dalam memungut pajak air tanah yang rendah. Dari uraian mengenai kekurangan petugas lapangan dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah ini menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan petugas dalam melaksanakan pemungutan; c). Kondisi Lingkungan, menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kinerja UPTD dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah

di Kecamatan Bengkalis. Hal ini dikarenakan lingkungan di Kecamatan Bengkalis yang apabila dilihat dari kondisi kualitas air yang kurang memuaskan dalam hal ini adalah berwarna merah dan kurang layak di konsumsi sehingga bagi pemerintah dan masyarakat merasa keberatan dalam menetapkan pajak air tanah tersebut. Sebagian dari masyarakat menggunakan sumber air hujan untuk kebutuhan masak dan minum. Kondisi ini mejadi masalah tersendiri dalam merealisasikan pajak air tanah di kecamatan Bengkalis. Berdasarkan kondisi lingkungan kualitas air yang dimiliki pada air tanah yang berwarna merah tersebut maka menjadi kendala tersendiri dalam rangka merealisasikan pajak air tanah di Kecamatan Bengkalis.

SIMPULAN

Kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya masih rendah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain adalah faktor kesadaran wajib pajak air bawah tanah masih rendah dalam rangka membayar pajak sebagai bentuk kewajiban yang ditanggungnya. Hal ini membuat petugas pajak kewalahan dalam menagihnya dan juga kekurangan petugas lapangan dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah ini menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan petugas dalam melaksanakan pemungutan.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Anwar Prabu, Mangkunegara, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Herry Susanto, 2012, *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Dirjen Pajak RI*